

PENGUATAN RESILIENSI SOSIAL MELALUI INOVASI PROGRAM LORONG WISATA DI KOTA MAKASSAR

Marta Suharsih¹, Muh. Iqbal Latief², Pratiwi Wulandari³

¹²³Pusat Penelitian Opini Publik LPPM Unhas

Email Korespondensi: marta.suharsih@uin-alauddin.ac.id

Published: Juli, 2026

ABSTRACT

This study focuses on strengthening social resilience through the innovation of the Tourism Alley (Lorong Wisata) program among alley communities in Makassar City. Empirical data and facts indicate that numerous social problems are evident in the daily lives of these alley communities. This study aims to: (1) analyze and describe the various social problems faced by Tourism Alley communities; (2) analyze the actionable policy measures required to strengthen social resilience among Tourism Alley communities; and (3) analyze the utilization of social groups in addressing social problems and strengthening social resilience within Tourism Alley communities. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data sources comprise both primary and secondary data, collected through observation, in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), and documentation. The data analysis technique used consists of data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The findings show that: (1) the social problems evident among Tourism Alley communities include poverty, inadequate infrastructure, sanitation and waste management problems, population density, potential criminality, social conflict among residents, limited involvement of local government, and institutional dependency on the Alley Council (Dewan Lorong); (2) the actionable policies required center on the structuring and revitalization of the Tourism Alley environment, economic empowerment of the community, and capacity strengthening of Tourism Alley communities, implemented through various program innovations; and (3) the utilization of social groups in the Tourism Alley program involving Posyandu (integrated health post) cadres, PKK (Family Welfare Movement) cadres, majlis taklim (Islamic study groups), and youth groups has not yet operated optimally. Social resilience among alley communities through the Tourism Alley program has begun to take shape, but it remains confined to the micro level, thus requiring intervention from multiple stakeholders to optimize it.

Keywords: Social Resilience, Social Problems, Actionable Policy, Utilization of Social Groups, Tourism Alley Program.

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada kajian penguatan resiliensi sosial melalui inovasi program lorong wisata pada masyarakat lorong di Kota Makassar. Data dan fakta menunjukkan bahwa terdapat banyaknya masalah-masalah sosial yang nampak pada kehidupan masyarakat lorong. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis masalah sosial yang dihadapi masyarakat lorong wisata; (2) menganalisis bentuk kebijakan aplikatif yang diperlukan dalam rangka penguatan resiliensi sosial pada masyarakat lorong wisata; dan (3) menganalisis pemanfaatan kelompok sosial untuk menangani masalah sosial dan memperkuat resiliensi sosial pada masyarakat lorong wisata. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, *focus group discussion* (FGD), dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) masalah sosial yang nampak pada masyarakat di dalam lorong wisata meliputi kemiskinan, kurangnya infrastruktur, masalah kebersihan dan pengelolaan sampah, kepadatan penduduk, potensi kriminalitas, konflik sosial antar warga, minimnya keterlibatan pemerintah lokal, dan ketergantungan institusional Dewan Lorong; (2) bentuk kebijakan aplikatif yang diperlukan bermuara pada aspek penataan dan revitalisasi lingkungan lorong wisata, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan kapasitas masyarakat lorong wisata yang diimplementasikan dengan berbagai inovasi program; serta (3) pemanfaatan kelompok sosial pada program lorong wisata melibatkan kader posyandu, kader PKK, majelis taklim, dan kelompok pemuda, namun belum berjalan secara maksimal. Resiliensi sosial pada masyarakat lorong melalui program lorong wisata sudah terbentuk, tetapi masih berada pada tatanan mikro, sehingga dibutuhkan intervensi berbagai pihak untuk mengoptimalkannya.

PENDAHULUAN

Kebijakan inovasi "Lorong Wisata" Kota Makassar yang digagas Walikota Makassar, Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto, dari perspektif Sosiologi dimaknai sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan resiliensi sosial masyarakat kota. Resiliensi sosial adalah kemampuan suatu sistem sosial untuk mempertahankan keutuhan atau integrasi sosialnya pada saat dan/atau setelah mendapat gangguan baik dari dalam maupun dari luar (Rilus Kinseng, 2019). Lorong wisata merupakan kebijakan yang diambil bertepatan dengan situasi masyarakat yang makin rentan akibat pandemi Covid-19, yang memberi dampak signifikan bagi masyarakat Kota Makassar dari sisi ekonomi maupun sosial. Kebijakan ini diberi payung hukum melalui Peraturan Walikota (Perwali) Makassar Nomor 3 Tahun 2021 dan Perwali Makassar Nomor 94 Tahun 2022. Sejalan dengan visi-misi Kota Makassar, yaitu mewujudkan Makassar kota dunia yang "Sombere dan Smart City" dengan imunitas yang kuat, melalui tiga strategi utama: reformasi sumber daya manusia (SDM), rekonstruksi kesehatan, dan restorasi ruang kota yang inklusif.

Inovasi Lorong Wisata hadir dengan tujuan: (1) mengubah citra lorong dari kumuh menjadi hijau dan produktif; (2) mengembangkan kegiatan ekonomi lorong berbasis green garden, kuliner, dan kerajinan; (3) melakukan pemetaan dan klasterisasi potensi lorong berbasis teknologi informasi; (4) mengubah persepsi lorong yang rawan kriminalitas menjadi wilayah dengan interaksi sosial yang humanis; (5) mendorong masyarakat apatis menjadi kelompok yang produktif dan kompetitif; serta (6) menyediakan sarana dan prasarana untuk mengembangkan ekonomi lorong.

Kota Makassar memiliki kurang lebih 7.250 lorong yang tersebar di seluruh kecamatan dan kelurahan (DKP Kota Makassar, 2022). Tahapan awal untuk pembentukan dan pembinaan Lorong Wisata sebanyak 1.000 (seribu) lorong yang tersebar di 153 Kelurahan, hal ini sesuai dengan perencanaan dalam dokumen RPJMD Kota Makassar 2021-2026 dimana ditargetkan setiap tahun sebanyak seribu lorong. Sehingga seiring dengan perjalanannya, setiap kelurahan diwajibkan membentuk minimal 7 lorong wisata setiap tahunnya. Oleh karena itu, hingga saat ini jumlah lorong yang sudah terbentuk menjadi lorong wisata sesuai data dari Dinas Pariwisata Makassar (2023) sebanyak 1.846 (per 31 Mei 2023) dari target yang akan dicapai pada tahun 2026 sebesar 5.000 lorong wisata. Jumlah lorong yang besar ini, selain sebagai potensi pengembangan masyarakat, tidak dipungkiri juga memproduksi masalah sosial yang berimplikasi pada gangguan sosial. Lorong yang pada umumnya dihuni oleh kelompok masyarakat menengah dan pendatang dari daerah, kerap memproduksi masalah sosial berupa kriminalitas, putus sekolah, pernikahan dini, dan pengangguran. Dalam perspektif sosiologi, kompleksitas masalah sosial perkotaan ini diakibatkan oleh persaingan hidup yang makin ketat, baik dari aspek kultural maupun struktural (Soerjono Soekanto, 2012).

Meski program Lorong Wisata telah memperlihatkan gambaran yang positif sejak dicanangkan pada tahun 2021 dari beberapa aspek, namun masih terdapat sejumlah sisi yang belum optimal. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Asrianto (2023) yang menemukan adanya relasi sosial antara struktur dan agen di dalam pengelolaan lorong wisata yang berkembang. Studi lain yang dilakukan oleh Pratiwi Wulandari (2024) yang mengkaji lorong wisata dari perspektif kebijakan sosial menemukan bahwa terjadi diferensiasi dalam pengelolaan lorong wisata terutama dari fungsi Dewan Lorong sebagai penggerak partisipasi masyarakat yang kecenderungannya bersifat dualisme dalam perannya.

Menelusuri kemanfaatan dari program lorong wisata, belum ada studi yang secara khusus menganalisis keberadaan lorong wisata dalam upaya memperkuat resiliensi sosial dan menangani masalah sosial masyarakat lorong. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk

menggambarkan dan menganalisis penguatan resiliensi sosial berbasis lorong wisata di Kota Makassar, sekaligus merumuskan bentuk-bentuk kebijakan aplikatif yang dapat memperkuat implementasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis penguatan resiliensi sosial pada kebijakan inovasi lorong wisata di Kota Makassar. Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mengenai kecamatan dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kota Makassar, sehingga terpilih tiga kecamatan sebagai fokus penelitian, yaitu Kecamatan Makassar, Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Tallo. Berdasarkan ketiga kecamatan tersebut, peneliti selanjutnya menetapkan satu kelurahan pada masing-masing kecamatan sebagai unit analisis, yaitu Kelurahan Bara-Baraya Selatan (Kecamatan Makassar), Kelurahan Parang Tambung (Kecamatan Tamalate), dan Kelurahan Kaluku Bodoa (Kecamatan Tallo). Pemilihan lokasi ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang representatif mengenai dinamika sosial masyarakat lorong yang menjadi sasaran utama Program Lorong Wisata di Kota Makassar. Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Agustus 2024.

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan dua kategori: (1) informan wawancara mendalam, yaitu warga masyarakat yang bermukim di lorong wisata serta tokoh masyarakat dan pemerintah setempat; dan (2) informan Focus Group Discussion (FGD), yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan, meliputi pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan secara langsung di lapangan saat masyarakat beraktivitas di lorong; (2) observasi partisipatif terhadap segala aktivitas kegiatan lorong wisata; (3) dokumentasi dengan menelusuri berbagai sumber informasi yang akurat; serta (4) Focus Group Discussion (FGD) bersama berbagai instansi terkait pelaksanaan program lorong wisata. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan gambaran terkait lokasi penelitian dengan karakteristik yang berbeda-beda, diantaranya: Pertama, pada Kelurahan Parang Tambung, difokuskan pada tiga lorong, yaitu Lorong Saga, Lorong Daeng Jakking, dan Lorong Kyoto. Jalan poros kelurahan yang terlihat gersang dan padat berubah signifikan begitu memasuki Lorong Saga dan Lorong Kyoto, yang ditandai dengan mural warna-warni bertema pahlawan dan warisan budaya Sulawesi Selatan, jalan yang dicat cerah, gapura penanda pintu masuk, serta penghijauan di sepanjang lorong. Kondisi ini kontras dengan Lorong Daeng Jakking yang masih gersang dan sempit, tanpa mural maupun gapura, akibat kepadatan bangunan yang tidak menyisakan ruang dinding maupun lahan untuk penataan.

Secara fisik, rumah-rumah di ketiga lorong umumnya berdempetan, permanen, dan berbahan batu bata, dengan lebar jalan yang berbeda-beda, yakni Lorong Saga sekitar 1,5 meter, Lorong Daeng Jakking sekitar 1 meter, dan Lorong Kyoto mencapai 3 meter karena berfungsi sebagai jalan penghubung antara Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Jumlah rumah tercatat 40 unit di Lorong Saga, 18 unit di Lorong Daeng Jakking, dan 39 unit di Lorong Kyoto, dengan rata-rata penghuni 5 hingga 8 orang per rumah, bahkan sebagian dihuni oleh lebih dari satu kepala keluarga. Mayoritas warga bekerja di sektor informal dengan jam kerja panjang dan tidak menentu, didominasi oleh ibu rumah tangga dan buruh harian, sehingga hampir separuh penduduk lorong tercatat sebagai penerima bantuan sosial pemerintah; kondisi ini turut membuka peluang partisipasi perempuan yang lebih besar dalam Program Lorong Wisata dibandingkan laki-laki.

Kedua, pada Kelurahan Bara-Baraya Selatan, berfokus pada tiga lorong yang dikategorikan oleh pihak kelurahan ke dalam tingkat perkembangan yang berbeda, yaitu Lorong UMKM (kategori maju), Lorong Cinta Damai (kategori stagnan), dan Lorong Sipakatau (kategori belum berkembang). Lorong UMKM dinilai paling maju karena menaungi sebelas jenis usaha warga serta satu unit bank sampah, sehingga dipandang memiliki potensi perputaran ekonomi yang besar. Lorong Cinta Damai justru menonjol secara fisik, dengan mural warna-warni dan jalan bermotif permainan anak, namun aktivitas ekonominya tidak berkembang akibat rendahnya keterlibatan warga terhadap program.

Adapun Lorong Sipakatau belum menunjukkan perkembangan berarti, ditandai dengan minimnya penghijauan, usaha mikro yang dibentuk seadanya, dan penataan lingkungan yang belum berjalan. Bangunan rumah di ketiga lorong umumnya permanen dan berdempetan, dengan jalan berbahan paving blok pada Lorong UMKM dan Lorong Cinta Damai (lebar sekitar 2,5 meter), serta jalan coran pada Lorong Sipakatau (lebar sekitar 1 meter). Jumlah rumah tercatat 18 unit di Lorong UMKM, 20 unit di Lorong Cinta Damai, dan 14 unit di Lorong Sipakatau, dengan kondisi hunian yang relatif padat dan pola mata pencaharian informal yang serupa dengan Kelurahan Parang Tambung, yaitu didominasi oleh ibu rumah tangga dan buruh harian, dengan hampir separuh warga menerima bantuan sosial pemerintah.

Ketiga, Kelurahan Kaluku Bodoa yang berada di Kecamatan Tallo merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk terbesar di antara empat belas kelurahan lain di kecamatan tersebut, yaitu sebanyak 23.325 jiwa. Besarnya jumlah penduduk ini berimplikasi pada jumlah lorong wisata yang relatif banyak, mengingat regulasi Perwali mewajibkan setiap kelurahan menambah sedikitnya tujuh lorong wisata setiap tahun. Sejak tahun 2022 hingga 2024, Kelurahan Kaluku Bodoa telah menetapkan 21 lorong wisata, di antaranya Lorong Sulapa Appa dan Lorong Mr. Big yang menjadi titik dokumentasi dalam penelitian ini, dengan penetapan lorong dilakukan berdasarkan penunjukan pihak kelurahan setempat. Secara keseluruhan, ketiga kelurahan tersebut memperlihatkan variasi karakteristik fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat lorong di Kota Makassar, mulai dari lorong yang telah tertata baik secara visual dan ekonomi, lorong yang berkembang pada satu aspek namun stagnan pada aspek lain, hingga lorong yang masih jauh dari sentuhan Program Lorong Wisata. Keragaman kondisi inilah yang menjadi dasar empiris bagi analisis lebih lanjut mengenai masalah-masalah sosial, bentuk kebijakan aplikatif, serta pemanfaatan kelompok sosial dalam upaya penguatan resiliensi sosial masyarakat lorong, sebagaimana diuraikan pada bagian berikut.

Masalah Sosial dalam Lorong Wisata

1. Kemiskinan

Lorong-lorong yang telah disulap menjadi lebih menarik secara visual menyimpan realitas pahit kemiskinan yang masih membayangi penghuninya. Sebagian besar warga lorong masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Banyak yang bekerja serabutan atau mengandalkan ekonomi informal dengan penghasilan tidak menentu. Indikasi nyata kemiskinan ini tampak dari banyaknya penerima bantuan sosial merupakan penduduk lorong. Anak-anak di beberapa lorong pun terpaksa putus sekolah karena ketidakmampuan orang tua membiayai pendidikan. Meski program lorong wisata bertujuan meningkatkan ekonomi lokal, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu NR yang menyatakan bahwa: “susah ini adek saya ini tinggal dari jualan-jualan minuman ini mami ku hidupi diriku, tidak adami juga suami anak ku masih sekolah juga kadang kita tidak makan tommki karena banyak kebutuhan”.

Ia juga menambahkan bahwa:

“saya yang kutahu dari ini program toh dek Lorong wisata itu, Lorong yang dikasih cantik saja Lorong nya dikasih cat cat, terus ada tumbuhan di pinggir-pinggirnya. Kalau mau ditanya apa dirasa tidak adaji dek kayakji seperti dulu kurasa ini hidupku”.

Selain itu, pengangguran dan underemployment menjadi persoalan serius di kalangan warga lorong wisata ini. Banyak yang bekerja serabutan atau mengandalkan ekonomi informal dengan penghasilan yang tidak menentu. Beberapa mencoba peruntungan dengan berjualan makanan dan minum-minuman yang dalam seharinya belum diketahui apakah ada yang laku terjual atau tidak, namun pendapatan mereka seringkali tidak cukup untuk mengangkat taraf hidup keluarga secara signifikan.

2. Kurangnya Infrastruktur dan Fasilitas Umum

Lorong-lorong di Kota Makassar, meski telah dirubah menjadi lebih menarik, ternyata masih menghadapi tantangan serius dalam hal infrastruktur dan fasilitas umum. Jalan-jalan sempit yang menjadi ciri khas lorong ini seringkali berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Permukaan jalan yang tidak rata, dan mudah tergenang air saat hujan tidak hanya mengurangi kenyamanan masyarakat

yang tinggal didalamnya, tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan bagi warga setempat. Sebagaimana penuturan oleh Pak DK yang menyatakan bahwa:

“itu Lorong dek toh sempit ki, dikasih lagi pot bunga bahaya juga untuk yang naik motor nanti na tabrak kodong, belum lagi kalau ada anak anak yang main main toh, jalan juga kan tidak rata ki kayak didepan itu ada sedikit paving bloknya yang agak naik daripada dibelakang”

Sistem drainase yang buruk menjadi permasalahan lain yang mencolok. Saat musim hujan tiba, banyak lorong berubah menjadi genangan air yang sulit dilalui. Hal ini tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berpotensi menjadi sarang nyamuk dan sumber penyakit. Kurangnya perhatian terhadap sistem pembuangan air ini juga berkontribusi pada masalah sanitasi yang lebih luas di kawasan ini. Penerangan jalan umum juga menjadi isu serius yang perlu diperhatikan, terdapat beberapa bagian lorong yang gelap saat malam hari karena kurangnya lampu jalan atau penerangan yang tidak berfungsi dengan baik. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan keamanan bagi warga yang tinggal didalamnya.

3. Masalah Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

Pemandangan kontras antara dinding-dinding berwarna-warni dan tumpukan sampah di sudut-sudut lorong menjadi pemandangan yang terlalu sering dijumpai. Sistem pengumpulan sampah yang tidak teratur dan tidak memadai menjadi akar permasalahan ini. Keterbatasan akses kendaraan pengangkut sampah ke lorong-lorong sempit juga menyulitkan pengangkutan rutin. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta perilaku membuang sampah sembarangan ke saluran air memperburuk kondisi sanitasi dan estetika lorong. Seperti yang diutarakan oleh ibu DW yang menyatakan bahwa:

“itu mobil sampah dek jarang sekali datang, nah ini sampah toh menumpukmi. Sukaja itu protes, tapi begitumi kalau sudahki protes datangmi besoknya tapi nanti begituji lagi Kembali jadi ituji biasa kasih pusing ki karena menumpuk mi sampah dan berbau mi”

Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan juga berkontribusi pada masalah ini. Meski sebagian warga telah berupaya menjaga kebersihan di depan rumah mereka, masih banyak yang belum memiliki kebiasaan membuang sampah pada tempatnya atau memilah sampah. Perilaku membuang sampah sembarangan, terutama ke saluran air, semakin memperburuk kondisi sanitasi dan estetika lorong. Pengelolaan sampah yang buruk juga berdampak pada sistem drainase lorong. Sampah yang menyumbat saluran air menyebabkan genangan dan banjir saat hujan turun. Hal ini tidak hanya mengganggu aktifitas warga, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangbiakan nyamuk dan penyebaran penyakit.

4. Kepadatan Penduduk yang Tinggi.

Kawasan yang semula merupakan permukiman padat harus menampung beban ganda sebagai tempat tinggal dan destinasi wisata. Ruang terbuka yang sangat terbatas menjadi konsekuensi langsung dari kepadatan ini, sehingga anak-anak terpaksa bermain di lorong-lorong sempit. Sistem pembuangan limbah rumah tangga seringkali tidak mampu menampung beban dari jumlah penduduk yang besar, dan privasi menjadi barang langka karena dinding-dinding tipis antar rumah hampir tidak menyisakan ruang pribadi bagi penghuni. Sesuai yang dikatakan oleh ibu TI:

“dimana mi dek itu kodong mau disimpan itu hidroponik, kita lihat mi saja ini Lorong sempit sekalimi, kalau disimpan itu hidroponik dipinggir dimana mi bisa orang lewat, tidak ada tommy juga tempat duduk di pinggir jalan karena banyak pot bunga”

5. Potensi Kriminalitas yang Mengancam Keamanan

Karakteristik fisik lorong yang sempit, berliku, dan seringkali kurang penerangan menciptakan kondisi rentan terhadap tindak kejahatan. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba juga menjadi kekhawatiran di beberapa area lorong. Kurangnya pengawasan dan patroli keamanan yang konsisten, serta keterbatasan akses kendaraan darurat ke lorong-lorong sempit, memperburuk situasi keamanan dan keselamatan penduduk. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu ML yang menyatakan bahwa:

“itu dek kalau malam biasa gelap tapi sekarang adami lampu dipasangkan, kemarin juga sempat adaji CCTV tapi beberapa bulan rusakmi lagi. Ituji biasa ditakutkan kalau ada pencurian toh dek tapi sejauh ini amanji cuma begitumi karena ini lorong kan tembus tembus jadi rawan biasa ada pencurian”

Kurangnya pengawasan dan patroli keamanan yang konsisten di area lorong wisata semakin memperburuk situasi. Keterbatasan akses dan sumber daya membuat aparat keamanan kesulitan melakukan pengawasan menyeluruh. Sistem keamanan mandiri oleh warga lokal, seperti ronda atau pos keamanan lingkungan, seringkali tidak memadai untuk menangani kompleksitas keamanan. Masalah pencahayaan yang tidak memadai di malam hari menjadi faktor signifikan yang berkontribusi pada kerawanan keamanan. Banyak lorong yang minim penerangan, menciptakan area gelap yang berpotensi menjadi tempat persembunyian pelaku kejahatan atau lokasi untuk aktifitas ilegal. Keterbatasan akses darurat juga menjadi perhatian serius, lorong-lorong sempit dan berliku seringkali sulit dilalui oleh kendaraan darurat seperti ambulans atau mobil pemadam kebakaran. Dalam situasi genting, keterlambatan penanganan dapat berakibat fatal. Kondisi ini mengancam keselamatan penduduk setempat.

6. Konflik Sosial antar Warga.

Transformasi cepat dari kawasan pemukiman biasa menjadi lorong wisata menciptakan berbagai gesekan dan ketegangan dalam masyarakat. Kesenjangan ekonomi yang semakin terlihat antara warga yang berhasil memanfaatkan peluang ekonomi dan warga yang tidak terlibat langsung menimbulkan kecemburuan sosial. Persaingan dalam pemanfaatan ruang publik memicu perselisihan antar warga, sehingga batas antara ruang privat dan publik menjadi semakin kabur meninggalkan ketidaknyamanan dan konflik kepentingan. Seperti yang dikatakan ibu NR, yang menyatakan bahwa: “itu disana toh dek ada aparat yang na simpan kendang ayamnya dilorong padahal luas ji lorongnya, tapi tidak ada bisa tegurki karena deh takut semua orang, karena suka sekali marah marah itumi ayamnya yang suka kasih mati disini tumbuh-tumbuhan karena kalau siang na lepas mi”.

Masalah pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan juga sering memicu perselisihan. Beberapa warga merasa bahwa tetangga mereka tidak berkontribusi secara adil dalam menjaga kebersihan lorong, sementara yang lain merasa bahwa beban membersihkan sampah tidak seharusnya jatuh pada mereka. Ketidakjelasan tanggungjawab dan kurangnya sistem pengelolaan yang terorganisir semakin memperburuk situasi.

7. Minimnya Keterlibatan Pemerintah Lokal

Keterlibatan pemerintah setempat hanya terlihat pada saat adanya kunjungan pihak eksternal ke lorong wisata. Kurangnya inisiatif pemerintah setempat terkait program lorong wisata mematikan semangat dan inisiasi masyarakat untuk mengembangkan potensi lorong mereka. Dampak paling nyata dari minimnya keterlibatan ini ialah kurangnya infrastruktur pendukung yang memadai, masalah pendanaan yang krusial, kurangnya program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, serta lemahnya promosi dan pemasaran lorong wisata.

Disamping itu, gaya kepemimpinan seorang pemimpin di suatu daerah juga sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat terhadap suatu program. Merujuk pada kurangnya inisiatif pemerintah setempat terkait program lorong wisata juga mematikan semangat dan inisiasi masyarakat untuk mengembangkan program lorong wisata yang ada di dalam lorong mereka. Hal ini terjadi atas dasar keterlibatan pemerintah setempat selaku pemangku kebijakan tidak memberikan sumbangsih secara langsung kepada masyarakat, sedang masyarakat sebagai agen memerlukan arahan dan pendampingan dari pemerintah setempat guna berkelanjutannya program lorong wisata.

Sementara dengan massifnya keterlibatan pemerintah setempat dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk ikut terlibat dalam segala aktifitas yang berkenaan dengan program lorong wisata. Pemerintah setempat juga sebagai agen dan channeling yang dapat menjembatani untuk mengisi kesenjangan informasi antara masyarakat dengan program/kebijakan yang terkait dengan pengembangan lorong wisata. Serta memfasilitasi kemitraan dan kolaborasi yang menjadi penghubung antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya di dalam lorong

wisata, sehingga dapat mendorong sinergitas dan kerjasama yang baik guna memperkuat keberlanjutan program lorong wisata yang optimal.

8. Ketergantungan Institusional Dewan Lorong

Dewan Lorong sangat bergantung pada arahan atau dukungan dari pemerintah setempat untuk menjalankan fungsinya. Ketergantungan ini menyebabkan Dewan Lorong tidak dapat mengoptimalkan potensi lorongnya karena selalu menunggu instruksi dari atas, alih-alih mengambil inisiatif sendiri. Akibatnya, inovasi program lorong wisata terbatas, respons terhadap peluang dan tantangan di lapangan menjadi lambat, serta partisipasi masyarakat mengalami penurunan karena tidak ada dorongan dan fasilitasi yang memadai dari Dewan Lorong. Disamping itu, ketergantungan institusional dewan lorong terhadap pemerintah di atas (top-up) cenderung berkenaan dengan kurangnya modal yang diberikan oleh pemerintah dan/ataupun pihak terkait dalam pengembangan program lorong wisata.

Sehingga dewan lorong juga tidak dapat mengambil tindakan apapun dalam upaya pengembangan program lorong wisata. Kendala utama yang juga menjadikan dewan lorong secara struktural ada tetapi perannya tidak nampak secara fungsional dikarenakan tidak adanya insentif dari pemerintah sebagai stimulus dewan lorong untuk efektif menjalankan fungsi dan perannya sebagai motor penggerak di tingkat lokal dalam program lorong wisata.

Bentuk Kebijakan Aplikatif dalam Mewujudkan Penguatan Resiliensi Sosial pada Masyarakat Lorong Wisata

Penguatan resiliensi sosial pada masyarakat Lorong Wisata di Kota Makassar memerlukan serangkaian kebijakan aplikatif yang komprehensif dan terintegrasi. Langkah awal yang krusial adalah implementasi program pengembangan kapasitas masyarakat, yang berfokus pada peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan adaptasi penduduk lokal. Program ini dapat mencakup pelatihan kewirausahaan, manajemen pariwisata, dan pelestarian budaya lokal. Bersama dengan itu, diperlukan kebijakan perlindungan sosial dan ekonomi yang menjamin kesejahteraan masyarakat di tengah perkembangan sektor pariwisata, seperti jaminan kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Selanjutnya, pengembangan regulasi pengelolaan Lorong Wisata berbasis masyarakat menjadi kunci dalam memastikan partisipasi aktif dan manfaat langsung bagi penduduk setempat. Kebijakan ini harus memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Lorong Wisata, serta menjamin distribusi keuntungan yang adil. Untuk mendorong inovasi dan kreativitas lokal, pemerintah perlu menerapkan kebijakan insentif yang mendukung pengembangan produk dan layanan wisata unik berbasis kearifan lokal. Hal ini dapat berupa bantuan modal, pendampingan usaha, atau kemudahan perizinan bagi usaha-usaha kreatif yang mendukung daya tarik Lorong Wisata.

Serangkaian penerapan kebijakan aplikatif ini secara holistik, diharapkan resiliensi sosial masyarakat Lorong Wisata di Kota Makassar dapat terpelihara dan bahkan meningkat, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang muncul dari perkembangan sektor pariwisata. Berikut uraian lebih lanjut:

- Pertama, penataan dan revitalisasi lingkungan lorong wisata. Konsep ini meliputi perbaikan fasad bangunan, penataan ruang publik, pengembangan sistem sanitasi yang baik, penghijauan area lorong, serta pelestarian elemen-elemen budaya dan sejarah yang menjadi ciri khas lorong. Perbaikan infrastruktur jalan, drainase, dan sanitasi terbukti memiliki efek multiplier pada ekonomi lokal, meningkatkan kohesi sosial, dan memberikan dampak positif terhadap keamanan lingkungan. Proses perbaikan infrastruktur yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi karena menghasilkan infrastruktur yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat.
- Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat lorong wisata. Kebijakan ini mencakup program pengembangan UMKM, pelatihan kewirausahaan, manajemen pariwisata, dan pelestarian kuliner serta produk budaya lokal. Selain itu, diperlukan kebijakan insentif yang mendukung pengembangan produk dan layanan wisata berbasis kearifan lokal berupa bantuan modal, pendampingan usaha, dan kemudahan perizinan.

- Ketiga, penguatan kapasitas masyarakat lorong wisata. Program ini berfokus pada peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan adaptasi penduduk lokal.

Termasuk di dalamnya jaminan perlindungan sosial dan ekonomi yang menjamin kesejahteraan masyarakat di tengah perkembangan sektor pariwisata, serta pengembangan regulasi pengelolaan lorong wisata berbasis masyarakat yang menjamin partisipasi aktif dan distribusi keuntungan yang adil.

Pemanfaatan Kelompok Sosial pada Program Lorong Wisata

Kebijakan yang berkaitan dengan masalah pada inovasi program lorong wisata, selama ini lebih bersifat topdown yang mana prakarsa untuk menyelesaikan masalah tersebut lebih banyak di drive (arahan) dari pemerintah termasuk pemerintah daerah. Karena itu, semua kebijakan, program dan kegiatan untuk yang berkenaan dengan inovasi program lorong wisata dominan dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini, kemudian menjadi masalah karena peran serta dan partisipasi masyarakat khususnya pada masyarakat lorong, menjadi pasif bahkan cenderung apatis (masa bodoh). Padahal dari sisi efektivitas (keberhasilan) kebijakan dan program pembangunan, masyarakat menjadi unsur penentu sebagai subyek dari tidak lagi diposisikan sebagai obyek dalam menyelesaikan masalah terutama yang nampak pada masyarakat di lorong wisata.

Penelitian ini menemukan bahwa dari sisi peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap upaya menyelesaikan masalahnya, masih sangat rendah. Apalagi pada masyarakat lorong, beragam ditemukan peran serta tersebut cenderung masih lemah dengan perilaku yang ditampakkan adalah perilaku pasif dan apatis. Padahal dalam upaya menyelesaikan permasalahan pada program lorong wisata, peran serta dan partisipasi masyarakat lorong yang justru dapat berkontribusi positif terhadap keberhasilan dan keberlanjutan program Lorong wisata yang tentu ditunjang oleh sinergi tas antara berbagai stakeholder. Hal temuan dalam penelitian ini menemukan bahwa inisiasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah dalam program lorong wisata cenderung masih apatis. Indikasinya, karena kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat belum berperan aktif untuk membantu menyelesaikan sekelumit problem masyarakat di lorong wisata. Padahal pemanfaatan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat, salah satunya adalah menjadi agen dan channeling dalam membantu pemerintah menyelesaikan masalah masyarakat di lorong wisata. Upaya pembangun kesadaran dan partisipasi masyarakat pada program lorong wisata dengan menginisiasi adanya pelibatan kelompok-kelompok sosial. Meski kelompok sosial tersebut belum secara terorganisir dan melembaga akan tetapi, melalui kelompok sosial tersebut tercipta forum yang dimiliki oleh masyarakat lorong sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat lokal.

Pemanfaatan kelompok sosial dalam program lorong wisata merupakan strategi yang menarik dan potensial. Mengingat, bahwa keberhasilan dan keberlanjutan program lorong wisata dapat dimulai dari rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat atas program tersebut. Sehingga secara langsung akan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lorong dalam berbagai inovasi program yang diinisiasi. Disamping itu, program yang melibatkan masyarakat sebagai kelompok sosial cenderung lebih memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal sehingga peningkatan kualitas hidup masyarakat lorong dapat terealisasi. Oleh karena itu, pemanfaatan kelompok sosial dalam program lorong wisata dapat menjadi inklusif, beragam dan berkelanjutan. Hal ini juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program lorong wisata.

Pemberdayaan kelompok sosial pada program lorong wisata yang ditemui dari hasil penelitian ini melibatkan pemanfaatan kelompok sosial melalui Kader Posyandu, Kader PKK, Majelis Taklim, serta Kelompok Pemuda yang tersebar di beberapa lorong wisata dengan berbagai peran yang dijalankan, sebagai berikut:

1. Kader Posyandu

Pembangunan kesehatan masyarakat merupakan kegiatan swadaya masyarakat yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan melalui perbaikan status kesehatan dan gizi. Keberhasilan akan pelaksanaan pembangunan kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat tidak bisa lepas dari berbagai dukungan dan peran aktif yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Dalam hal ini peran yang besar adalah peran Pos Pelayanan Terpadu

(Posyandu) yang secara langsung berhadapan dengan berbagai permasalahan kemasyarakatan termasuk masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat oleh petugas kesehatan bersama kadernya secara lengkap. Kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan secara rutin adalah pelayanan Keluarga Berencana, kesehatan ibu dan anak, imunisasi, perbaikan gizi dan penanggulangan diare.

Program kesehatan menekankan pada potensi kader kesehatan sebagai komponen integral dari tenaga kesehatan. Kader kesehatan menyediakan layanan dalam membantu masyarakat untuk mengadopsi perilaku dan gaya hidup sehat, salah satunya melalui layanan posyandu yang didukung oleh kader posyandu yang siap berperan. Selain sebagai kader kesehatan bagi bayi dan balita, kader posyandu saat ini tidak hanya menyentuh pada dua aspek tersebut tetapi secara komprehensif telah menyentuh pada ranah dewasa dan lansia sebagai tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, dalam mengembangkan dan menjalankan perannya secara fungsional kader posyandu dapat dimanfaatkan pada sejumlah program pemerintah untuk menyentuh masyarakat secara langsung, salah satunya dengan pelibatan kader posyandu pada inovasi program lorong wisata.

Berdasarkan data lapangan tergambar pemanfaatan Kader Posyandu dalam program lorong wisata yang ikut andil mensosialisasikan program lorong wisata kepada masyarakat lorong. Disamping itu, pendampingan yang senantiasa dilakukan oleh kader posyandu kepada masyarakat lorong guna memberikan edukasi berkenaan dengan program lorong wisata. Sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh kader posyandu di berbagai lorong wisata secara tidak langsung memberikan impact positif terhadap pengetahuan masyarakat tentang program lorong wisata yang senantiasa akan bermuara pada kesadaran masyarakat lorong terkait kemanfaatan program lorong wisata. Mengingat, dari hasil penelitian ditemukan bahwa sosialisasi dan pendampingan dari aparat pemerintah setempat kurang dilakukan kepada masyarakat lorong sehingga pemahaman masyarakat terkait program lorong wisata tidak berkembang. Namun, dengan rangkap peran yang dilakukan oleh kader posyandu secara fungsional akan membantu masyarakat membangun kesadaran dengan memanfaatkan berbagai inovasi program lorong wisata dengan sebaik mungkin.

2. Kader PKK

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang dikenal dengan istilah PKK biasanya diasosiasikan sebagai perkumpulan ibu-ibu yang memiliki kegiatan positif. PKK adalah organisasi kemasyarakatan untuk memberdayakan Perempuan dan berpartisipasi dalam Pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kelompok PKK terdiri dari kelompok yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, dimana fungsinya sebagai fasilitator, perencana, pelaksanaan dan penggerak di masing-masing jenjang terlaksananya program PKK.

Pemanfaatan kader PKK sebagai kelompok sosial dalam program lorong wisata senantiasa menjadi motor penggerak yang dapat membangkitkan gerakan masyarakat untuk ikut andil dalam berbagai program lorong wisata. Hal ini ditunjang oleh keterlibatan kader PKK dalam kegiatan lorong wisata, seperti gotong royong yang dilakukan bersama dengan masyarakat lorong guna menciptakan kelestarian lingkungan hidup pada masyarakat di dalam lorong wisata. Dengan gerakan aktif yang dipercontohkan oleh kader PKK senantiasa memantik kesadaran masyarakat lorong untuk ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan karena nilai kemanfaatan yang dirasakan.

3. Majelis Taklim

Pemanfaatan kelompok majelis taklim dalam program lorong wisata dinilai sebagai salah satu langkah strategis dalam menunjang kesuksesan program lorong wisata. Sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan islam non-formal, majelis taklim merupakan wadah silaturahmi antar masyarakat juga sebagai wadah dan saran dakwah dan pembinaan akhlak Islamiah masyarakat. Kehadiran kelompok majelis taklim tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana dakwah Islamiah, tetapi juga sarana interaktif masyarakat untuk berdakwah pada berbagai aspek

kehidupan lainnya. Salah satu contoh aplikatifnya dalam kehidupan masyarakat adalah, pemanfaatan kelompok sosial majelis taklim dalam sarana “dakwah” yang berkenaan dengan program pemerintah, yaitu inovasi program lorong wisata.

4. Kelompok Pemuda

Kelompok pemuda sebagai salah satu kelompok sosial yang turut diberdayakan dalam program lorong wisata. Peran pemuda yang sentral nampaknya dapat menjadi motor penggerak bagi keberlangsungan suatu program pemerintah, termasuk pada program lorong wisata. Pemuda yang secara kuantitas banyak ditemukan di dalam lorong menjadi salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan/diberdayakan. Kehadiran kelompok-kelompok pemuda dalam lorong yang identik dengan sejumlah problematika yang melekat pada mereka senantiasa menjadi stigma yang tidak dapat dinafikkan keberadaannya. Namun, dengan adanya program lorong wisata sinergitas antar pemuda menjadi lebih terlihat dikarenakan adanya kesadaran pemuda untuk ikut andil dalam berbagai program lorong wisata. Salah satu contoh mendasar yang sering ditemukan pada keterlibatan pemuda dalam setiap program kebersihan lorong dalam bentuk gotong royong bersama masyarakat di dalam lorong. Keikutsertaan pemuda dalam beragam program lorong wisata senantiasa membentuk kesatuan mereka, sehingga lahirlah kelompok pemuda dalam masyarakat lorong wisata.

Sejumlah masalah sosial dan penerapan resiliensi yang telah diuraikan diatas, nampaknya masih memerlukan penguatan dalam beberapa aspek yang disandarkan pada konsep resiliensi sosial secara utuh, sebagaimana konsep resiliensi sosial yang dikemukakan oleh Sharifi (dalam Christina T. Permana, dkk, 2023) yang memuat lima dimensi, yaitu dimensi institusional, dimensi lingkungan, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dan dimensi infrastruktur. Berdasar pada temuan penelitian, konsep resiliensi sosial yang dikemukakan oleh Sharifi (dalam Christina T. Permana, dkk, 2023) terimplementasi pada masyarakat lorong wisata dengan penerapan yang cukup berbanding terbalik. Dalam konsepnya, pertama; pada dimensi institusional ini memuat kekuatan institusi yang dapat mempengaruhi upaya meningkatkan resiliensi sosial masyarakat lorong. Berbagai pihak terkait mengkoordinasikan sejumlah kebijakan dan inovasi program lorong wisata yang diterapkan menggunakan pendekatan yang menggabungkan top-down dan bottom-up. Dimana pemerintah sebagai institusi menetapkan guideline umum dan target pencapaian, namun detail pelaksanaan dan inovasi program diserahkan pada tataran lokal (masyarakat lorong) yang mengetahui kebutuhannya sendiri yang selaras dengan visi dan misi pemerintah.

Namun dalam pengaplikasiannya kecenderungan pendekatan yang diterapkan masih berada pada tataran pendekatan top-down sehingga masyarakat harus terus menunggu arahan dari pihak pemerintah untuk melakukan suatu inovasi di dalam lorongnya tanpa adanya inisiatif sendiri dari masyarakat lorong dalam menyelesaikan permasalahannya. Disamping itu, minimnya keterlibatan pemerintah lokal, yang mengindikasikan perlunya penguatan aspek institusional secara signifikan. Keterlibatan aktif pemerintah lokal sangat diperlukan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pengembangan Lorong Wisata sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Hal ini mencakup pembentukan kerangka hukum dan regulasi yang jelas, alokasi sumber daya yang memadai, serta koordinasi antar lembaga pemerintah terkait.

Penguatan dimensi institusional juga melibatkan pembentukan mekanisme tata kelola yang partisipatif dan inklusif. Ini dapat diwujudkan melalui pembentukan forum multipihak yang melibatkan perwakilan masyarakat, pelaku usaha lokal, akademisi, dan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan Lorong Wisata. Forum semacam ini dapat menjadi wadah untuk menyelaraskan berbagai kepentingan, mengatasi potensi konflik, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan pada tingkat komunitas juga menjadi penting. Ini meliputi pemberdayaan organisasi masyarakat lokal seperti RT/RW, karang taruna, dan kelompok sadar wisata (pokdarwis) agar dapat berperan lebih aktif dalam pengelolaan dan pengembangan Lorong Wisata. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui pelatihan manajemen organisasi, perencanaan program, dan

pengelolaan keuangan. Dengan penguatan dimensi institusional yang komprehensif, diharapkan dapat tercipta landasan yang kuat bagi resiliensi sosial komunitas Lorong Wisata di Kota Makassar.

Kedua, pada dimensi lingkungan; menjadi aspek vital dalam upaya penguatan resiliensi sosial Lorong Wisata di Kota Makassar, mengingat masalah kebersihan dan pengelolaan sampah yang dihadapi oleh komunitas. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada estetika dan daya tarik Lorong Wisata sebagai destinasi wisata, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan degradasi lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, upaya penataan dan revitalisasi lingkungan Lorong Wisata harus menjadi prioritas utama dalam strategi penguatan resiliensi sosial. Implementasi sistem pengelolaan sampah terpadu menjadi langkah krusial dalam mengatasi permasalahan lingkungan di Lorong Wisata. Ini meliputi pengadaan infrastruktur persampahan yang memadai, seperti tempat sampah terpilah, bank sampah, dan unit pengolahan sampah skala komunitas. Selain itu, edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan perlu dilakukan secara intensif untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Program-program seperti lomba kebersihan antar lorong, insentif untuk praktik pengelolaan sampah yang baik, dan pelatihan daur ulang sampah dapat menjadi strategi efektif dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Aspek penghijauan dan pengembangan ruang terbuka hijau juga perlu menjadi perhatian dalam dimensi lingkungan. Penanaman pohon, pembuatan taman vertikal, dan pengembangan kebun komunitas tidak hanya akan meningkatkan estetika Lorong Wisata, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan kualitas udara, pengurangan efek urban heat island, dan peningkatan keanekaragaman hayati perkotaan. Selain itu, inisiatif seperti penerapan teknologi ramah lingkungan, seperti penggunaan lampu hemat energi dan sistem pemanenan air hujan, dapat menjadi langkah konkret dalam mewujudkan konsep eco-tourism di Lorong Wisata. Dengan pendekatan holistik terhadap dimensi lingkungan, diharapkan dapat tercipta Lorong Wisata yang tidak hanya resilient secara ekologis, tetapi juga menjadi model bagi pengembangan wisata perkotaan berkelanjutan.

Ketiga, pada dimensi sosial; Dimensi sosial merupakan inti dari upaya penguatan resiliensi sosial di Lorong Wisata Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan adanya potensi konflik sosial antar warga, yang dapat menjadi hambatan serius dalam pembangunan resiliensi komunitas. Namun, di sisi lain, keberadaan kelompok-kelompok sosial seperti kader posyandu, kader PKK, majelis taklim, dan kelompok pemuda merupakan modal sosial yang sangat berharga. Penguatan kohesi sosial dan pemanfaatan optimal modal sosial yang ada menjadi kunci dalam membangun komunitas Lorong Wisata yang resilient.

Strategi penguatan dimensi sosial dapat dimulai dengan program-program yang mendorong interaksi dan kerjasama antar warga. Ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti gotong royong berkala, festival budaya lorong, atau program pertukaran keterampilan antar warga. Selain itu, pembentukan forum dialog warga yang regular dapat menjadi wadah untuk mengatasi potensi konflik secara dini dan membangun kesepahaman antar kelompok masyarakat. Pelatihan resolusi konflik dan mediasi komunitas juga perlu diberikan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan kelompok sosial yang ada. Pemanfaatan dan penguatan kelompok-kelompok sosial yang sudah ada juga menjadi strategi penting dalam dimensi sosial. Kader posyandu dan PKK dapat diberdayakan tidak hanya untuk urusan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam pengembangan Lorong Wisata. Majelis taklim dapat berperan dalam mempromosikan nilai-nilai sosial dan budaya lokal kepada pengunjung, sementara kelompok pemuda dapat dilibatkan dalam pengembangan atraksi wisata kreatif dan pengelolaan media sosial Lorong Wisata. Dengan mengoptimalkan peran kelompok-kelompok ini, diharapkan dapat terbangun jaringan sosial yang kuat dan terorganisir, yang merupakan fondasi penting bagi resiliensi komunitas Lorong Wisata di Kota Makassar.

Keempat, pada dimensi ekonomi; Dimensi ekonomi memainkan peran vital dalam penguatan resiliensi sosial Lorong Wisata di Kota Makassar, terutama mengingat masalah kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal menjadi kunci utama dalam membangun ketahanan ekonomi komunitas. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan sektor UMKM berbasis potensi lokal, yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru juga mendiversifikasi sumber pendapatan masyarakat. Implementasi program-program pelatihan kewirausahaan yang spesifik dan relevan dengan konteks Lorong Wisata menjadi langkah strategis.

Pelatihan ini dapat mencakup aspek-aspek seperti manajemen usaha kecil, pemasaran digital, dan pengembangan produk wisata kreatif. Selain itu, fasilitasi akses terhadap modal melalui skema kredit mikro atau kemitraan dengan lembaga keuangan lokal dapat membantu masyarakat dalam memulai atau mengembangkan usaha mereka.

Kelima, pada dimensi infrastruktur; menjadi aspek krusial dalam membangun resiliensi komunitas Lorong Wisata di Kota Makassar, mengingat kurangnya infrastruktur dan fasilitas umum yang memadai. Peningkatan kualitas infrastruktur tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, tetapi juga memperkuat daya tarik Lorong Wisata sebagai destinasi wisata perkotaan. Prioritas utama dalam dimensi ini adalah perbaikan dan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, saluran air, dan sistem sanitasi. Perbaikan jalan setapak dengan material yang ramah lingkungan namun tahan lama dapat meningkatkan aksesibilitas sekaligus mempertahankan karakter unik lorong. Pengembangan sistem drainase yang efektif dan instalasi pengolahan air limbah komunal dapat mengatasi masalah banjir dan pencemaran air yang sering menjadi kendala di kawasan padat penduduk.

Sebagai kesimpulan pada konsep resiliensi sosial pada program lorong wisata melalui lima dimensi diatas memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan kelima dimensi resiliensi sosial tersebut: institusional, lingkungan, sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Melalui penguatan aspek institusional, diharapkan tercipta tata kelola yang efektif dan partisipatif. Perbaikan dimensi lingkungan akan menciptakan Lorong Wisata yang bersih, hijau, dan berkelanjutan. Penguatan dimensi sosial akan membangun kohesi sosial yang kuat dan memanfaatkan modal sosial yang ada. Pemberdayaan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan peluang usaha baru. Sementara itu, peningkatan infrastruktur akan memperkuat fondasi fisik bagi pengembangan Lorong Wisata.

Implementasi strategi penguatan resiliensi sosial ini memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi. Pemerintah berperan dalam menyediakan kerangka kebijakan dan dukungan sumber daya. Masyarakat sebagai aktor utama harus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan pengembangan. Sektor swasta dapat berkontribusi melalui investasi dan kemitraan strategis, sementara akademisi dapat memberikan masukan ilmiah dan melakukan monitoring evaluasi. Akhirnya, penguatan resiliensi sosial di Lorong Wisata Makassar harus dipandang sebagai proses jangka panjang yang memerlukan komitmen berkelanjutan. Evaluasi dan adaptasi strategi secara berkala diperlukan untuk merespon dinamika perubahan dan tantangan baru yang mungkin muncul. Dengan pendekatan yang komprehensif dan adaptif, diharapkan Lorong Wisata di Kota Makassar tidak hanya menjadi destinasi wisata yang menarik, tetapi juga menjadi model pengembangan komunitas perkotaan yang resilient dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam hasil penelitian ini diuraikan pada penggambaran temuan sebagai berikut:

1. Penguatan resiliensi sosial dalam menangani masalah-masalah sosial di dalam masyarakat lorong wisata cenderung masih bersifat lemah. Kesadaran penuh masyarakat terhadap program lorong wisata sebagai upaya resiliensi yang diberikan pemerintah belum berujung pada optimalisasi keberdayaan masyarakat lorong, sehingga resiliensi sosial juga ikut melemah. Oleh karena itu, efektifitas program lorong wisata dalam menangani masalah-masalah sosial masyarakat dalam lorong belum mampu dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan termasuk didalamnya aparat penyelenggara di tingkat bawah.
2. Sinergitas antar dinas/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan (stakeholders), belum cukup memadai sehingga implementasi kebijakan dalam bentuk program cenderung dilakukan secara fragmentaris (sendiri-sendiri). Dukungan kebijakan dalam bentuk struktur kelembagaan, sumber daya manusia dan finansial, serta sistem pengendalian (monitoring dan evaluasi) belum memadai.
3. Pemanfaatan kelompok sosial sebagai penguatan resiliensi sosial masyarakat dalam program lorong wisata masih berada pada tataran sederhana. Sehingga optimalisasi pelibatan kelompok sosial dalam serangkaian inovasi program lorong wisata belum cukup memadai dan terbatas pada kegiatan-kegiatan sederhana dan sporadis.

REFERENCES

- Asrianto, Muhammad, R., & Raf, N. (2023). Perubahan sosial di Kelurahan Tello Baru melalui program lorong wisata. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 117–130. <https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.2973>
- Kinseng, R. A. (2019). Resiliensi sosial dari perspektif sosiologi: Konsep dan aplikasinya pada komunitas nelayan kecil. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i1.623>
- Pemerintah Kota Makassar. (2021). Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021–2026. Pemerintah Kota Makassar.
- Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lorong Wisata. Permana, C. T., Mukaromah, H., Rahayu, P., Astuti, W., Andini, I., Rahayu, M. J., Rini, E. F., Putri, R. A., & Pujantiyo, B. S. (2023). *Heritage dan resiliensi kota*. Deepublish.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Perss
- Wulandari, P. (2024). Kebijakan sosial lorong wisata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Makassar [Tesis, Universitas Hasanuddin]. Repositori Universitas Hasanuddin. http://repository.unhas.ac.id/34951/2/E032221006_tesis_04-04-2024%201-2.pdf.